

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Hingga saat ini, penguasaan sistem politik global dikuasai oleh Amerika Serikat (AS). Negara yang dijuluki sebagai negara "*Adi Daya*" tersebut menguasai seluruh aspek kehidupan politik atau instrument politik internasional. Antara lain pada aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Banyak sekali peran serta AS di dalam perpolitikan internasional. AS merupakan negara yang sangat bergantung pada aspek perekonomian dunia dan militer. Tidak diragukan lagi bahwa AS sebagai negara yang besar sangat bergantung pada dua aspek kehidupan politik internasional tersebut.

Sikap bergantung pada hal tersebut ditunjukkan oleh Amerika Serikat dalam setiap keikutsertaannya di kancah politik dunia. Salah satunya yaitu keikutsertaan AS dalam konflik di Timur Tengah (*Middle East Conflict*). Kekuatan militer pun dikedepankan oleh negara tersebut dalam setiap aksi keikutsertaannya pada setiap konflik di Timur Tengah. AS cenderung memiliki

profokatif dalam menjalani hubungan dengan suatu negara. Contoh yang terjadi di Timur Tengah hanya salah satu dari sekian banyak contoh dari bagaimana politik luar negeri Amerika Serikat berlangsung.

Sejak peristiwa runtuhnya gedung kembar World Trade Centre (WTC) yang terjadi pada tanggal 11 september 2001 yang banyak memakan korban jiwa.² Dapat dikatakan Amerika Serikat sangat terpukul. Peristiwa tersebut dinilai pemerintah Amerika Serikat sebagai tindakan terorisme yang dapat mengancam terciptanya perdamaian dunia. Berbagai macam upaya dilakukan pemerintah Amerika Serikat untuk memerangi pelaku terorisme. Salah satu cara yang diterapkan oleh Amerika Serikat dalam memerangi terorisme tersebut yakni salah satunya dengan mengandalkan kekuatan militernya. Hal tersebut juga didukung oleh sekutu Amerika Serikat seperti Inggris, Israel dan Australia.

Keterlibatan-keterlibatan Amerika Serikat untuk meraih kepentingan nasionalnya dalam dunia internasional sudah lama terjadi. Awalnya dilatar belakangi oleh pemikiran-pemikiran mantan presiden AS yang ingin menegakkan demokrasi dunia yakni masalah penegakan hak asasi manusia. Kepedulian politik dalam kebijakan luar negeri AS terhadap hak asasi manusia mendorong pemerintah Jimmy Carter memberikan kebijakan khusus terhadap negara-negara yang melanggar hak asasi manusia.

jauh lebih banyak dibanding pemerintahan siapapun dalam sejarah plotik AS.⁵ Presiden-presiden Amerika Serikat yang juga menjalankan misi Jimmy Carter yang serupa yakni Ronald Reagan, George Bush, dan Bill Clinton. Masing-masing dari mereka mempunyai cara-cara yang berbeda dalam menjalankan misinya dalam hal penegakan hak asasi manusia di dunia.

Seiring bergantinya waktu dan perkembangan jaman, misi-misi para petinggi negara AS tersebut berangsur-angsur berubah, bahkan melenceng dari misi semula. AS bahkan menggunakan kekuatan militernya dalam misi penegakan hak asasi manusia bagi dunia. Ironisnya, disamping misi penegakan hak asasi manusia tersebut, AS memiliki misi-misi yang lain seperti dalam aspek ekonomi, politik dan militer.

Selama ini, AS selalu berupaya menyulut friksi antar-etnis, bangsa, dan negara di Timur Tengah. Karena hal tersebut akan membuat negara-negara terkait semakin bergantung pada AS. Saat ini pun, AS berusaha menciptakan perselisihan antara bangsa Arab, Persia, Kurdi dan Turki. Dalam hal ini, banyak masalah yang dijadikan dalih oleh Gedung Putih antara negara di kawasan Timur Tengah atas berbagai alasan seperti masalah teritori, historis, politik, ekonomi dan lain-lain. Pihak yang paling profesional dalam hal ini adalah Inggris dan kini AS meniru langkah Inggris. Hingga saat ini, banyak kita

⁵ Sidik Jatmika, *As Penghambat Demokrasi: Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat*, GRAF publishing, Yogyakarta, 2001, hal.47. dikutip dari buku David P. Forsythe *Human Rights*

saksikan munculnya perselisihan teritori antar negara di kawasan yang merupakan warisan masa penjajahan.

Keterlibatan dan pengaruh Amerika Serikat dalam konflik Palestina dengan Israel memang sangat besar sekali. Telah lama Amerika Serikat menjanjikan menyelesaikan konflik Palestina dengan Israel, Amerika Serikat juga mendukung penuh berdirinya negara Palestina. Sikap yang dilakukan oleh Amerika Serikat memang terkesan kontroversial, di satu sisi Israel merupakan tangan kanan Amerika Serikat, namun disisi lain Palestina merupakan musuh besar Israel. Dengan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“Kepentingan Amerika Serikat Dalam Proses Pembentukan Negara Palestina”**.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa kepentingan suatu negara terhadap situasi konflik disuatu wilayah.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab atau alasan Amerika Serikat memberikan dukungannya dalam pembentukan negara Palestina
3. Disamping itu penulisan ini juga ditujukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas

C. Latar Belakang Masalah

Kedamaian dan ketenteraman adalah hal yang penting untuk kemajuan sebuah negara. Seperti halnya di Timur Tengah yang merupakan kawasan dengan sensitifitas sangat tinggi di dunia. Banyak dari negara-negara barat khususnya Amerika Serikat (AS) menaruh kepentingan disana. Segala cara dilakukan oleh AS untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Konflik yang berujung pada perang akan menimbulkan instabilitas, menghambat dan menghentikan kemajuan serta pembangunan di berbagai bidang. Kekuatan imperialis memahami baik hal ini. Mereka selalu berusaha menciptakan konflik antar negara dan menciptakan instabilitas, bahkan perang antar negara. AS sebagai pemimpin kaum imperialis sekaligus kekuatan adidaya terbesar dunia, menggulirkan politik konfrontatif ke seluruh penjuru dunia. Politik AS di kawasan Timur Tengah merupakan bukti konkret metode untuk menyulut perpecahan, instabilitas, dan krisis di berbagai kawasan di dunia ini.

Krisis paling kuno dan terpenting di Timur Tengah adalah masalah pendudukan Palestina oleh Israel. Krisis ini telah menimbulkan ketegangan serta konflik antara Palestina dan Israel yang kemudian menyulut peperangan antara negara-negara Arab dan Rezim Zionis. Selama ini, AS selalu mendukung penuh Israel yang selalu menjadi penyebab dari seluruh gejolak dan krisis di kawasan

Timur Tengah. Dan hal itulah tujuan utama pembentukan Rezim Zionis di bumi Palestina. Tidak heran jika dalam pertempuran Rezim Zionis melawan negara-negara Arab, AS menyuplai bantuan kepada Rezim Zionis. Tidak hanya itu, Washington juga berulang kali memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menuntut dihentikannya aksi pendudukan atas Palestina dan pembantaian warga Palestina oleh Rezim Zionis. Akibat dukungan AS, Rezim Zionis bukan hanya menduduki Palestina melainkan menguasai sebagian wilayah negara-negara tetangga dari Palestina.⁴

Bila ditelusuri lebih mendalam, konflik dua negara ini melibatkan dua variabel penting, yaitu politik dan juga sejarah. Dua variabel tersebut menjadi isu penting dalam konteks konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina ini. Sebagian kalangan menilai bahwa konflik yang terjadi di antara dua negara ini pada dasarnya dilandasi oleh motif dan landasan historis. Kedua negara berkonflik dalam rangka merebut sebuah wilayah, yang menurut klaim historis masing-masing, merupakan hak dasar kedaulatan wilayah negaranya. Lebih jauh lagi, wilayah itu dianggap sebagai daerah suci yang memiliki dasar teologis dalam konsep agama Islam, Kristen dan Yahudi. Dalam hal pembahasan ini, Palestina dengan dasar teologi Islam sedangkan Israel dengan dasar teologi Yahudi.

Konflik Palestina dengan Israel menjadi tidak adil sejak penguasa Inggris melalui *Balfour Declaration* pada 1917 terang-terangan membantu kaum imigran

⁴ <http://abatasya.net/perspektif/peran-antagonis-as-di-timur-tengah.html>

Yahudi dari Eropa Timur yang menempuh berbagai cara untuk merebut tanah-tanah milik warga Palestina. Dengan demikian, kaum imigran Yahudi berhasil mendirikan sebuah negara merdeka bernama Republik Israel pada 14 Mei 1948.⁵ Setelah Israel memproklamkan kemerdekaannya muncul Perang antara Arab-Israel pada tahun 1948. Lima negara Arab yang terdiri dari Arab Saudi, Suriah, Mesir, Trans-Yordania, Libanon dan Irak, menyerang Israel. Bagi Israel, perang ini merupakan perang mempertahankan kemerdekaan negaranya yang baru berdiri, sedangkan bagi bangsa Arab perang ini bertujuan untuk mengusir Israel dari tanah Arab. Gencatan senjata berhasil diredam oleh PBB pada tanggal 7 Januari 1949, akan tetapi Israel berhasil menguasai wilayah seluas 20.780 km² atau 3/4 wilayah Palestina (yang meliputi Yerusalem Barat, sebagian Gaza dan Kantong Jaffa), suatu wilayah yang lebih luas dari yang ditentukan dalam Resolusi PBB nomor 181 tahun 1947 yang berisi tentang pembagian wilayah Palestina menjadi dua yaitu satu negara Arab merdeka dan sebuah negara Yahudi⁶.

Akan tetapi perang di kawasan Timur Tengah tidak lantas berhenti, perang antara Israel dengan Mesir pecah pada tahun 1956 ketika presiden Gamal Abdul Nasser menasionalisasikan Terusan Suez. Serdadu Israel dengan dukungan

⁵ http://suaramerdeka.com/harian/0801/26/opi04/Akar_Konflik_Palestina-Israel.htm

⁶ http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/26/opi04/Akar_Konflik_Palestina-Israel.htm

pasukan Inggris dan Perancis, menyerang Mesir dan menduduki Semenanjung Sinai. Namun PBB dengan dukungan AS dan USSR berhasil menghentikan perang tersebut. Sehingga pada tanggal 6 November 1956, Israel dan Mesir menyetujui gencatan senjata. Kemudian pasukan PBB ditempatkan di sepanjang perbatasan yang bertindak sebagai penyangga dan menjamin kebebasan pelayaran di Teluk Aqoba. Pada bulan Maret 1957, Israel menarik pasukannya dari Mesir.

Perang Enam Hari tahun 1967. Perang ini merupakan kelanjutan dari perang pada tahun 1957, dan pecah pada tanggal 5 sampai 10 Juni 1967. Ketika itu Israel menyerang Mesir, Suriah dan Yordania, menyusul penarikan mundur pasukan PBB dari Semenanjung Sinai dan setelah Mesir menutup Teluk Aqoba. Dalam perang tersebut, Israel berhasil merebut Gurun Sinai, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, dan dataran tinggi Golan. Dengan jatuhnya wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza ke tangan Israel, berarti seluruh wilayah yang disediakan bagi negara Arab Palestina sesuai dengan rencana PBB, sekarang sudah dikuasai oleh Israel seluruhnya. Kemenangan Israel ini tidak terlepas dari dukungan militer AS⁷.

Meskipun PBB berhasil menghentikan perang tersebut pada tanggal 11 Juni 1967, namun PBB tetap menyatakan keprihatinan berkenaan dengan keadaan yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu pada tanggal 22 November 1967, PBB mengeluarkan resolusi 242 sebagai dasar bagi penyelesaian yang adil dan kekal bagi konflik Arab-Israel. Resolusi itu pada intinya menyerukan agar Israel

segera menarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki dalam konflik yang terakhir, dan pengakuan atas kedaulatan, integritas teritorial dan kemerdekaan politik dari setiap negara di kawasan tersebut, serta hak-hak mereka untuk hidup dalam perdamaian dengan batas-batas yang aman dan diakui. Masalah pengungsi muncul sebagai akibat dari perang Arab-Israel 1948. Masalah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur muncul sebagai akibat dari Perang Enam Hari pada 1967. Akan tetapi PLO segera menolak resolusi 242, karena dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa masalah Palestina hanya sekedar masalah pengungsi.

Konflik Israel dengan Palestina itu bukan cerita satu episode. Tetapi suatu episode yang berkepanjangan. Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Ketidakadilan itu terus berlangsung hingga kini, seiring dengan masih belum terwujudnya cita-cita bangsa Palestina mendirikan sebuah negara merdeka di Jalur Gaza dan Tepi Barat dengan Ibu Kota Yerusalem Timur. Jika hal ini tidak terjadi

bersikukuhnya sikap Israel yang di lindungi AS dan Inggris menjajah Palestina, di pihak lain selama kondisi status quo seperti itu terus berlangsung, sangat tidak mungkin negara Palestina merdeka dapat didirikan. Terlebih bangsa Palestina sendiri tercerai-berai kelompok perlawanan Hamas dan Fatah sebagai dua kelompok perlawanan terbesar dan tidak bisa bersatu.

Pengakhiran dukungan AS dan Inggris terhadap perilaku kolonial Israel serta bersatunya bangsa Palestina dalam menghadapi Israel menjadi syarat mutlak bagi berdirinya negara Palestina merdeka demi terselesaikannya konflik Israel-Palestina secara adil. Kalau kita melihat Palestina selalu di bawah dominasi asing. Ketika Palestina lepas dari Inggris, Palestina diikutkan ke dalam Yordania dan Mesir, tahun 1948-1967. Setelah itu, wilayah Jalur Gaza, ada di bawah kontrol Israel sepenuhnya. jika melihat itu, maka ada banyak hal yang harus dibenahi, baik di dalam internal Palestina maupun hubungannya dengan pihak luar.

Di dalamnya, selama tiga periode penguasaan tersebut, kita melihat perpecahan menjadi sumber masalah yang utama yang ada di Palestina. Kalau sekarang muncul dalam bentuk perseteruan Hamas-Fatah. terjadinya perang saudara yang sekaligus menciptakan bencana kemanusiaan, tidak terlepas dari dua unsur yang melatarbelakanginya, yaitu unsur eksternal berupa ikut bermainnya kepentingan-kepentingan asing dan unsur internal berupa lemahnya soliditas antar kelompok. Kurang solidnya kondisi internal Palestina tecermin dari banyaknya

faksi atau kelompok perjuangan yang sering berkonflik akibat perbedaan strategi perjuangan di antara mereka.

Hamas masih teguh menentang berdirinya negara Yahudi Israel, sedangkan Fatah bersikap lebih pragmatis dengan mengakui eksistensi Israel. Kebijakan standar ganda tersebut tampak dari penerapan taktik *stick and carrot* atau menerapkan sanksi kepada pihak nonkooperatif dan sebaliknya memberikan berbagai macam bantuan terhadap pihak yang dianggap kooperatif. AS dan Israel telah berbuat apa saja untuk mencegah akomodasi antara Hamas dan Fatah serta menganggap kebijakan AS yang mendukung kelompok Fatah dan sebaliknya menghambat pergerakan Hamas adalah bagian dari upaya membagi Palestina.⁸

Masalah kedua, hubungan Palestina dengan pihak luar. Dalam konteks Inggris, sudah jelas. Karena Inggris menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina, tetapi tidak pernah ditepati. Kemudian yang terjadi perang kemerdekaan melawan Inggris. Akan tetapi pada masa Yordania, permasalahan dengan Yordania cenderung tidak muncul hingga pada akhirnya Palestina sepenuhnya dikontrol Israel. Konflik ini semakin jelas, yang harus dilakukan adalah upaya kemerdekaan. Akan tetapi upaya kemerdekaannya sendiri tidak bisa dilakukan hanya oleh Palestina. Karena yang dihadapi adalah kekuatan yang cukup kuat, dan dibutuhkan banyak kekuatan asing untuk menegakkan kestabilan sistemnya.

Peranan Amerika Serikat masih dianggap sebagai kunci dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah khususnya konflik antara Israel dan Palestina. Dukungan AS atas Palestina akan menjadikan langkah yang semakin konkrit dalam mewujudkan kedaulatan negara Palestina. Sementara itu, sampai saat ini sudah dilakukan penarikan mundur pasukan israel dari beberapa wilayah di Palestina.

Hal ini memberikan arahan yang positif bagi pemerintahan Mahmoud Abbas dalam rangka perjuangan bangsa Palestina. Karena pada prinsipnya, semakin jauh pasukan israel menarik mundur pasukannya dari wilayah-wilayah pendudukan, akan semakin terbuka peluang untuk memperjuangkannya di meja perundingan. Sampai beberapa tahun yang lalu, AS masih menjadi penjaga setia negara zionis Israel dalam menancapkan kekuatannya di wilayah Palestina.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka muncul permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

“Dasar keberuntungan Amerika Serikat dalam ...”

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi serta untuk memilih konsep yang tepat dalam membentuk hipotesa, maka diperlukan suatu kerangka teoritis. Pada uraian kepentingan Amerika Serikat dalam proses pembentukan negara Palestina, titik berat penulis tertuju pada tingkat politik luar negeri Amerika Serikat dalam pencapaian tujuan nasionalnya terhadap situasi konflik antara Palestina dengan Israel. Untuk memperjelas hal tersebut, penulis menggunakan Konsep yang digunakan untuk menjelaskan pokok permasalahan di atas yaitu proses pembuatan keputusan politik luar negeri Graham T. Allison.

Politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (*Decision Maker*) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional⁹.

Dalam studi Hubungan Internasional, kita dapati bahwa kajian kebijakan luar negeri sangat luas dan kompleks. Kebijakan luar negeri dalam pengertian luas terdiri atas pola-pola yang diwujudkan oleh suatu negara dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan nasional, dalam hubungannya dengan negara lain atau dilakukan terhadap lingkungan eksternalnya. Politik luar

⁹ Jack C. Diener & Ben Oltan, "Kebijakan Hubungan Internasional," *Journal of International Law*, 1988.

negeri dapat berarti sebagai tindakan rasional (*Rational Action*) suatu negara dalam usaha memenuhi kepentingan nasionalnya di lingkungan internasional, dapat juga berarti hanya sebagai pernyataan gramatik yang diucapkan oleh para pemimpin atau penguasa suatu negara terhadap masyarakat internasional, dapat juga sebagai agregasi seluruh kepentingan dalam negeri suatu negara atau bangsa¹⁰.

Teorisasi dalam hubungan internasional yang mempelajari politik luar negeri, yaitu Graham T. Allison yang mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri. Ada tiga model yang diajukan oleh Graham T. Allison yaitu Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi dan Model Politik Birokratik. Untuk dapat menjelaskan dan menerangkan permasalahan di atas, penulis menggunakan model yang pertama, yaitu Model Aktor Rasional. Dalam proses pembuatan tulisan ini penulis menggunakan Aktor Rasional untuk dapat mempermudah mendeskripsikan mengenai proses pembuatan keputusan luar negeri serta mengenai fenomena perubahan politik luar negeri sebuah negara.

¹⁰ Taha Wazita, "Teori Teori Politik Luar Negeri" Yogyakarta, Di: 2000, 11, 73

Model Aktor Rasional



Mohtar Mas'ood dalam bukunya, "*Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*":

".....politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional , terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu *proses intelektual*. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu."¹¹

¹¹ Mohtar Mas'ood "*Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*" UPPS, Jakarta, 1999

Setiap negara digambarkan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak didasarkan atas kepentingan dirinya sendiri. Dan yang paling mendasar adalah menjaga kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan melakukan alternatif-alternatif kebijakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Tabel Untung Rugi

Opsi	Keuntungan	Kerugian
1. Alternatif A	Ada	Ada
2. Alternatif B	Ada	Ada
3. Alternatif C	Ada	Ada

Sumber : Graham T. Alison, *"The Essence OF Decision"*. dikutip dari bahan perkuliahan

Taori Hubungan Internasional No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Dari tabel untung-rugi di atas kita akan dapat melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi landasan dari kebijakan politik AS atas proses pembentukan negara Palestina. Dalam hal ini posisi AS sangat dilematis mengingat desakan akan segera dibentuknya negara Palestina semakin besar. Bagi Palestina sendiri, pembentukan negara hingga berujung kepada kemerdekaan yang berdaulat sangat menguntungkan sekali apabila semua itu terwujud.

Amerika Serikat merupakan suatu negara yang haus akan kekuasaan. Hal ini dibuktikan oleh AS dengan menginvasi negara-negara di kawasan Timur Tengah guna mencapai tujuan dari politik luar negeri tersebut. Sehingga apa yang dilakukan oleh AS terkesan memaksa. Sebagai bentuk dukungan AS terhadap proses pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, AS bersedia menjadi tuan rumah KTT Annapolis.

Konferensi Annapolis yang diprakarsai AS itu berlangsung dalam suhu politik yang cukup mendidih. Pro-kontra terjadi di mana-mana. Baik di internal negara-negara Arab sendiri maupun Israel. Penyelenggaraan konferensi perdamaian merupakan hal yang positif. Akan tetapi, upaya AS bersama sekutunya hanya sebatas retorika politik. Sudah menjadi rahasia umum jika AS melakukan kebijakan standar ganda dalam hal konflik Israel-Palestina.

Di satu pihak, AS menekan Palestina untuk menghancurkan infrastruktur perlawanan bersenjata yang dianggap sebagai aktivitas terorisme. Di lain pihak, Washington sering kali menutup mata atas berbagai tindak kekerasan luar biasa yang dilakukan militer maupun institusi intelijen Israel terhadap rakyat Palestina.

Kondisi Palestina yang bisa dikatakan sangat lemah karena terhimpit oleh kekuatan besar, sehingga hal tersebut lebih dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing khususnya AS. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Israel dengan Palestina memang terlampau jauh, akan tetapi hal yang demikian bisa dikatakan alternatif dari kegagalan AS di negara Timur Tengah lainnya.

F. Hipotesa

Dari dasar pemikiran yang telah diterapkan, dalam penelitian tentang kepentingan Amerika Serikat dalam proses pembentukan negara Palestina, maka penulis akhirnya sampai pada hipotesa yaitu kepentingan Amerika Serikat dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan nasional AS di kawasan Timur Tengah, yakni AS perlu memperbaiki citra negatif di mata internasional. Serta memperbaiki citra negatif AS di kawasan Timur Tengah.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dan sebagainya.

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literatur yang relevan, surat kabar, dan internet.
2. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatif (menjelaskan) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan atau berapa yang berwujud pada menganalisa dari fakta-fakta yang terkumpul, yang didapat melalui data kualitatif.
3. Metode berdasar hubungan dengan obyek penelitian adalah unobtrusive yaitu historical comparative research, dengan melihat dari pendekatan sejarah dalam penjabarannya untuk mengkaji peristiwa berdasarkan kesinambungan waktu dari masa lalu hingga masa sekarang.

H. Jangkauan Penelitian

Agar tidak terjadi pembahasan yang meluas, maka perlu ditetapkan jangkauan penulisan, maka penulis hanya membatasi jangkauan penelitian pada bidang kajian tentang kepentingan Amerika Serikat dalam proses pembentukan negara Palestina dari tahun 2003 sampai kurun waktu 2007 hingga terjadinya peristiwa KTT Annapolis. Namun tidak menutup kemungkinan membahas

I. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana antara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kebulatan yang utuh.

- Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari : Alasan pemilihan judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan terakhir adalah Sistematika Penulisan.
- Bab II. Berisikan tentang bagaimana gambaran umum kondisi politik di Timur-Tengah khususnya konflik antara Arab dengan Israel, sejarah dari Palestina dan Israel.
- Bab III. Berisikan analisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat, selain itu akan dibahas manufer politik Amerika serikat di tingkat regional maupun ditingkat global.
- Bab IV. Berisikan pembahasan tentang kepentingan Amerika Serikat dalam pembentukan negara Palestina pasca KTT Annapolis November 2007.
- Bab V. Penutup / Kesimpulan, berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari sebuah hal-hal yang dikumpulkan pada bab